



Equal Justice Equal Pay Foundation
Pigmentstraat 51
1019 AN, Amsterdam

Tanggapan dari Yayasan Equal Justice Equal Pay (“Yayasan”) atas “Jawaban atas Pertanyaan Parlemen Terkait Surat Parlemen ‘Tanggapan Tertulis atas Laporan “The Flag Register and the Country of Residence Principle: Economic and Strategic Value” (Register Bendera Kapal dan Prinsip Negara Tempat Tinggal: Nilai Ekonomi dan Strategis)’ tertanggal 28 September 2026 (Aanhangsel Handelingen II 2026, nr. 2026Z16887)”

Menteri mengakui kesenjangan upah di kapal Belanda, tetapi menolak bertanggung jawab

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Belanda, Vellinga-Beemsterboer dan Nijenhuis (keduanya dari D66), telah mengajukan pertanyaan kepada Menteri Infrastruktur dan Pengelolaan Air, Mr. Karremans, terkait praktik di kapal-kapal Belanda yang membayar pelaut asal Filipina dan Indonesia kurang dari setengah upah per jam yang diterima rekan-rekan mereka dari Eropa. Hal tersebut terjadi karena penerapan hal yang dikenal sebagai “*country of residence principle*” (prinsip negara tempat tinggal).

Namun, “*country of residence principle*” bukan merupakan prinsip hukum yang berlaku secara umum. Pekerja seharusnya diberi kompensasi berdasarkan nilai pekerjaan yang dilakukan, terlepas dari siapa individu yang melakukan pekerjaan tersebut.

Para anggota parlemen tersebut meminta Menteri untuk menanggapi dua laporan yang disusun mengenai ke(tidak)setaraan upah pelaut asal Indonesia dan Filipina, yang masing-masing memberikan gambaran yang sangat berbeda:

- Laporan yang ditugaskan oleh Kementerian Infrastruktur dan Pengelolaan Air menunjukkan bahwa 50% hingga 70% perusahaan pelayaran Belanda akan melakukan *flag out* apabila diwajibkan membayar pelaut mereka secara setara.
- Namun, laporan yang disusun oleh SEO *Economisch Onderzoek* atas permintaan Yayasan menunjukkan bahwa paling banyak hanya 20% perusahaan pelayaran yang akan melakukan hal tersebut. Selain itu, tidak terdapat indikasi bahwa dampak ekonominya akan signifikan, mengingat bendera kapal hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap kegiatan berbasis darat dalam klaster maritim.

Sayangnya, Menteri menolak mengakui bahwa penerapan “*country of residence principle*” tersebut menimbulkan persoalan. Menteri menyatakan bahwa “tidak ada putusan pengadilan” yang menyatakan bahwa penerapan prinsip tersebut tidak diperbolehkan. Namun, hukum Belanda dan Konstitusi Belanda secara tegas melarang diskriminasi. Selain itu, pada tahun 2025, Institut Hak Asasi Manusia Belanda memutuskan bahwa perbedaan berdasarkan ras dan kewarganegaraan tersebut dilarang. Menurut Menteri, hal tersebut hanya menyangkut para pihak dalam perjanjian kerja Bersama, dan bukan merupakan tanggung jawab Negara Belanda. Yayasan menilai pandangan tersebut sulit dipahami, mengingat pemerintah Belanda menetapkan bahwa perjanjian kerja bersama tersebut mengikat secara umum setiap tahunnya.

Yayasan juga menyayangkan bahwa Menteri sama sekali tidak menyinggung kesejahteraan para pelaut.

Menteri hanya menyatakan bahwa ia dapat memahami bahwa pembayaran upah yang lebih rendah kepada pelaut tertentu “menimbulkan pertanyaan.” Untuk mengubah sistem pengupahan tersebut,



Equal Justice Equal Pay Foundation

Pigmentstraat 51

1019 AN, Amsterdam

perlu dilakukan pembahasan pada tingkat global. Yayasan tidak keberatan apabila konsultasi dilakukan pada tingkat Eropa maupun global. Namun demikian, konsultasi internasional tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan persoalan yang jelas-jelas bersifat nasional ini terus berlanjut. Bagaimanapun juga, persoalan yang dihadapi adalah ketidaksetaraan upah yang diberikan oleh perusahaan pelayaran Belanda kepada pelaut yang bekerja di kapal berbendera Belanda.

Menteri menyampaikan bahwa ia telah meminta *Dutch National Agency for the Maritime Manufacturing Industry* (Badan Nasional untuk Industri Manufaktur Maritim Belanda) untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak di Belanda apabila perbedaan berdasarkan ras dan kewarganegaraan tidak lagi diterapkan, dan hasil penelitian tersebut akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Belanda pada musim semi tahun 2027. Yayasan berharap bahwa dalam kesempatan tersebut, Kementerian Infrastruktur dan Pengelolaan Air akan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kedudukan khusus para pelaut dan bahwa praktik diskriminasi yang dilarang ini dapat segera diakhiri.

Sementara itu, Yayasan sedang mempersiapkan langkah hukum lebih lanjut.

September 30, 2026

Kees van Ast, Ketua Dewan Yayasan Equal Justice Equal Pay
